

SILABI MATA KULIAH HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI

Fakultas	:	Syariah
Jurusan/ program studi	:	Hukum Bisnis Syariah
Mata Kuliah	:	Hukum Tindak Pidana Ekonomi
Kode Mata Kuliah	:	-
SKS	:	2
Standar kompetensi	:	Mahasiswa mampu mempelajari, memahami, dan mengamalkan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana ekonomi sesuai dengan profesinya.

NO	Kompetensi Dasar	Materi Pokok dan Rinciannya	Indikator	Strategi Pembelajaran	Penilaian	Waktu (menit)	Daftar Rujukan
I	1	2	3	4	5	6	7
1	Mahasiswa mempelajari dasar-dasar hukum pidana ekonomi	Hukum Pidana Ekonomi: a. Definisi b. Aspek sejarah c. Tujuan hukum d. Fungsi hukum pidana ekonomi di masyarakat e. Macam-macam tindak pidana ekonomi f. TPE dalam KUHP dan Peraturan Khusus Yang Mengatur Tentang TPE (UU No. 7 Tahun 1955 Dan Perpu No. 21 Tahun 1959)	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami: - Definisi, sejarah, tujuan dan fungsi hukum pidana ekonomi - Macam-macam tindak pidana ekonomi - Pengaturan (regulasi) TPE dalam KUHP dan Peraturan Khusus Yang Mengatur Tentang TPE (UU No. 7 Tahun 1955 Dan Perpu No. 21 Tahun 1959)	1. Seminar 2. Tanwa jawab (dialog)	- Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas	1 x pertemuan (100 menit)	1. A. Hamzah, <i>Hukum Pidana Ekonomi</i> , (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1996) 2. Romli Admasasmita, <i>Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis</i> , (Jakarta: Kencana, 2003) 3. Edi Setiadi & Rena Yulia, <i>Hukum Pidana Ekonomi</i> , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
2	Mahasiswa mempelajari hukum pidana secara umum	Mengenal hukum pidana secara umum: a. Definisi b. Prinsip dasar hukum pidana c. Regulasi hukum pidana di Indonesia d. Aplikasi hukum pidana dalam ekonomi e. Penegakan hukum pidana ekonomi	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami: - Definisi, prinsip dasar hukum pidana - Regulasi hukum pidana di Indonesia - Aplikasi hukum pidana dalam ekonomi	1. Seminar 2. Tanya jawab (dialog)	- Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas	1 x pertemuan (100 meneit)	1. Zainuddin Ali, <i>Hukum Pidana Islam</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) 2. PAF Lamintang, <i>Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia</i> , (Bandung: Citra Aditya, 1997) 3. Zainal Abidin Farid, <i>Hukum Pidana I</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 4. Dll.

3	Mahasiswa mempelajari hukum tindak pidana ekonomi terkait kejahatan korporasi	Hukum pidana di bidang korporasi a. Definisi b. Aspek yuridis c. Bentuk kejahatan korporasi d. Sanksi hukum kejahatan korporasi (<i>white collar crime</i>)	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami: - Definisi korporasi - Bentuk kejahatan korporasi - Regulasi terkait korporasi - Sanksi hukum kejahatan korporasi	1. Seminar 2. Tanya jawab (dialog)	- Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas	1 x pertemuan (100 meneit)	1. Muladi dan Widja Priyatno, <i>Pertanggungjawaban Pidana Korporasi</i> , (Jakarta: Prenanca Media, 2010) 2. Romli Atmasamita, <i>Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis</i> , (Jakarta: Prenada Media, 2005) 3. Imran Ahsan Khan Nyazee, <i>Islamic Law of Business Organization (Corporation)</i> . (Pakistan: The International of Islamic Thought, 1998)
4	Mahasiswa mempelajari hukum tindak pidana ekonomi terkait kejahatan perbankan	Hukum pidana di bidang perbankan a. Defini b. Aspek yuridis c. Bentuk2 kejahatan perbankan d. Sanksi hukum kejahatan perbankan e. Penyelesaian sengketa perbankan	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami: - Apa itu bank - Bentuk kejahatan bank - Regulasi perbankan - Sanksi hukum kejahatan perbankan - Penyelesaian senketa perbankan	1. Seminar 2. Diskusi kelompok sesi I	- Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Pembuatan makalah (paper) - Presentasi - Partisipasi kelas	1 x pertemuan (100 menit)	1. Andrean Sutedi, <i>Hukum Perbankan</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) 2. Sentosa Sembiring, <i>Hukum Perbankan</i> , (Jakarta: Mandar Maju, 2008) 3. Andrian Sutedi, <i>Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan</i> (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
5	Mahasiswa mempelajari hukum tindak pidana ekonomi terkait pencucian uang (<i>money laundering</i>).	Hukum pidana pencucian uang (<i>money laundering</i>) a. Definisi b. Aspek yuridis c. Bentuk tindak pidana <i>money laundring</i> d. Tindak pidana lain terkait dengan pencucian uang (<i>money laundering</i>) e. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) f. Sanksi hukum kejahatan di pasar modal	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan: - Definisi - Aspek yuridis - Bentuk tindak pidana <i>money laundring</i> - Tindak pidana lain terkait dengan pencucian uang (<i>money laundering</i>) - Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) - Sanksi hukum kejahatan di pasar modal	1. Seminar 2. Tanya jawab (dialog)	- Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas	1 x pertemuan (100 menit)	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3. NHT. Siahaan, <i>Money Laundering & Kejahatan Perbankan</i> , (Jakarta: Jala Permata, 2008) 4. Sutan Remy S., <i>Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme</i> , (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, t.t.)
6	Mahasiswa mempelajari hukum tindak pidana	Hukum pidana di bidang pasar modal a. Definisi	Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan:	1. Seminar 2. Tanya jawab	- Akhlakul karimah	1 x pertemuan (90 menit)	1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 2. M. Irsan Nasrudin dan Indra Surya,

	ekonomi terkait kejahatan pasar modal.	b. Aspek yuridis c. Bentuk kejahatan pasar modal d. Sanksi hukum kejahatan di pasar modal e. Dampak negatif penanaman modal asing (imperialisme modern).	- Definisi - Tinjauan yuridis - Bentuk kejahatan pasar modal - Sanksi hukum kejahatan pasar modal - Dampak negatif penanaman modal asing (imperialisme modern)	(dialog)	- Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas		<i>Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia</i> , (Jakarta: Prenada Media, 2004) 3. Burhanuddin S., <i>Pasar Modal Syari'ah: Tinjauan Hukum</i> , (Yogyakarta: UII Press, 2008) 4. Munir Fuady, <i>Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum</i> , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
7	Mahasiswa mempelajari hukum tindak pidana ekonomi terkait kejahatan bidang HAKI	Hukum pidana kejahatan di bidang HAKI: a. Definisi b. Aspek yuridis c. Macam-macam HAKI dan bentuk kejahatannya d. Sanksi hukum	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan: - Definisi - Aspek yuridis - Macam-macam HAKI dan bentuk kejahatannya - Sanksi hukum	1. Seminar 2. Tanya jawab (dialog)	- Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas	1 x pertemuan (100 menit)	1. Saidin, <i>Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual</i> , (Jakarta: Rajawali Press, 2000) 2. Abdulkadir Muhammad, <i>Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual</i> , (Bandung: Citra Aditya, 2007) 3. Rachmadi Usman, <i>Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia</i> , (Bandung: Alumsi, 2009) 4. DII
8	Ujian Tengah Semester [UTS]			Tertulis	Murni hasil ujian UTS		
9	Mahasiswa mempelajari hukum tindak pidana ekonomi terkait dengan kejahatan transaksi elektronik dan cyber crime	Kejahatan Transaksi Elektronik dan Cyber Crime a. Definisi b. Aspek yuridis c. Bentuk kejahatan transaksi elektronik d. Kejahatan cyber crime e. Sanksi hukum	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan: - Definisi - Aspek yuridis - Bentuk kejahatan transaksi elektronik - Kejahatan <i>cyber crime</i> - Sanksi hukum	1. Seminar 2. Diskusi kelompok sesi II	- Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Pembuatan makalah (paper) - Presentasi - Partisipasi kelas	1 x pertemuan (100 menit)	1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik 2. Romli Atmasamita, <i>Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis</i> , (Jakarta: Prenada Media, 2005) 3. Abdul Wahid dan Mohammad Labib, <i>Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)</i> , (2005)
10	Mahasiswa mempelajari hukum tindak pidana ekonomi terkait kejahatan korupsi	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: a. Definisi b. Dasar hukum c. Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi d. Korupsi dalam dunia ekonomi dan bisnis e. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) f. Penyidikan, penuntutan dan	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami: - Definisi, dasar hukum dan tujuan - Korupsi dalam dunia ekonomi dan bisnis - Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) - Ketentuan Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan - Sanksi hukum	1. Seminar 2. Tanya jawab (dialog)	- Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas	1 x pertemuan (100 menit)	1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 3. Evi Hartanti, <i>Tindak Pidana Korupsi</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

		pemeriksaan g. Sanksi hukum					4. Darwin Prinst, <i>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> , (Bandung: Citra Aditya, 2002)
11	Mahasiswa mempelajari hukum tindak pidana ekonomi terkait kejahatan penyiaran	Kejahatan di bidang jasa penyiaran: a. Definisi b. Aspek yuridis c. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) d. Bentuk kejahatan penyiaran e. Sanksi hukum	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami: - Definisi - Aspek yuridis - Komisi penyiaran Indonesia (KPI) - Bentuk kejahatan penyiaran - Sanksi hukum	1. Seminar 2. Tanya jawab (dialog)	- Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas	1 x pertemuan (100 menit)	1. Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 2. Undang-Undang No. Tahun 1999 tentang Pers 3. Peraturan yang terkait 4. DII
12	Mahasiswa mempelajari hukum tindak pidana ekonomi terkait kejahatan perburuan	Kejahatan ketenaga kerjaan (perburuan): a. Definisi b. Tinjauan yuridis c. Jaminan sosial tenaga kerja d. Bentuk kejahatan ketenaga kerjaan (perburuan) e. Hukum <i>outsourcing</i> f. Perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>) g. Sanksi hukum	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami: - Definisi - Aspek yuridis - Jaminan sosial tenaga kerja - Bentuk kejahatan ketenaga kerjaan - Hukum <i>outsourcing</i> - Perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>) - Sanksi hukum	1. Seminar 2. Tanya jawab (dialog)	- Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas	1 x pertemuan (100 menit)	1. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Lulu Husni, <i>Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia</i> , (Jakarta: Rajawali Press, 2000) 3. M. Nurachmad, <i>Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak (Outsourcing)</i> , (Jakarta: Visimedia, 2009) 4. DII
13	Mahasiswa mempelajari hukum lembaga keuangan non-bank yang terkait dana pensiun	Kejahatan pasar dan tindak pidana penimbunan: a. Definisi b. Aspek yuridis c. Bentuk-bentuk kejahatan pasar/ penimbunan d. Sanksi hukum	Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan: - Pengertian dan jenis dana pensiun - Pembinaan dan pengawasan dana pensiun - Aplikasi prinsip syariah dalam dana pensiun	1. Seminar 2. Diskusi kelompok sesi III	- Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Pembuatan makalah (paper) - Presentasi - Partisipasi kelas	1 x pertemuan (100 menit)	1. Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang 2. Usman Rachmadi, <i>Hukum Persaingan Usaha di Indonesia</i> , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004)
14	Mahasiswa mempelajari hukum tindak pidana ekonomi terkait kejahatan konsumen	Kejahatan Konsumen a. Definisi b. Dasar hukum perlindungan konsumen c. Bentuk kejahatan konsumen d. Penyelesaian senketa konsumen e. Kasus-kasus komtemporer f. Penyidikan dan sanksi: administratif dan pidana g. Hukum perlindungan konsumen internasional	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami: - Definisi - Dasar hukum perlindungan konsumen - Bentuk kejahatan konsumen - Penyelesaian senketa konsumen - Kasus-kasus kontemporer - Penyidikan dan pemberian sanksi: administratif dan pidana - Hukum perlindungan konsumen internasional	1. Seminar 2. Tanya jawab (dialog)	- Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas	1 x pertemuan (100 menit)	1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 3. Ahmadi Miru& Sutarman Yado, <i>Hukum Perlindungan Konsumen</i> , (Jakarta: Rajawali Press, 2004).

							4. Muhammad Muflih, <i>Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam</i> , (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
15	Mahasiswa mempelajari hukum tindak pidana ekonomi terkait dumping	Dumping: a. Definisi b. Aspek yuridis c. Dampak praktik dumping terhadap negara importir/ eksportir d. Prosedur permohonan dan tahapan penyelidikan anti dumping e. Sanksi hukum pelanggaran dumping	Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan: - Definisi - Aspek yuridis - Dampak praktik dumping terhadap negara importir/ eksportir - Prosedur permohonan dan tahapan penyelidikan anti dumping - Sanksi hukum pelanggaran dumping.	1. Seminar 2. Tanya jawab (dialog)	- Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas	1 x pertemuan (100 menit)	1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.427/MPP/Kep/9/2000 tentang Komite Antidumping Indonesia 3. Yulianto Syahyu, <i>Hukum Antidumping di Indonesia</i> , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) 4. Sukarmi, <i>Regulasi Antidumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) 5. DII
16	Mahasiswa mempelajari hukum tindak pidana ekonomi terkait larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	Larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat a. Definisi b. Aasas dan tujuan c. Perjanjian dan kegiatan yang dilarang d. Posisi dominan e. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) f. Tatacara penanganan perkara g. Sanksi hukum	Mahasiswa mengetahui dan memahami: - Definisi - Aasas dan tujuan - Perjanjian dan kegiatan yang dilarang - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) - Tatacara penanganan perkara - Sanksi hukum	1. Seminar 2. Tanya jawab (dialog)	- Akhlakul karimah - Absensi (kehadiran) - Partisipasi kelas	1 x pertemuan (100 menit)	1. Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. Keputusan Komisi Pengawas Usaha No.5/ KPPU/ KEP/ IX/ 2000 tentang Tatacara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999 3. Arie Siswanto, <i>Hukum Persaingan Usaha</i> , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) 4. Usman Rachmadi, <i>Hukum Persaingan Usaha di Indonesia</i> , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004) 5. DII
17	Mahasiswa mempelajari hukum tindak pidana ekonomi di bidang	Kejahatan Lingkungan hidup: a. Definisi b. Aspek yuridis	Mahasiswa mengetahui dan mempelajari: - Definisi	1. Seminar 2. Diskusi kelompok sesi	- Akhlakul karimah - Absensi	1 x pertemuan (100 menit)	1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

	lingkungan hidup	<p>c. Kedudukan tindak pidana lingkungan hidup</p> <p>d. Bentuk kejahatan lingkungan (limbah industri, illegal logging)</p> <p>e. Analisis mengenai dampak lingkungan</p> <p>f. Ketentuan <i>Corporate Social Responsibility/ CSR</i></p> <p>g. Sanksi hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek yuridis - Bentuk kejahatan lingkungan - Ketentuan <i>Corporate Social Responsibility/ CSR</i> - Sanksi hukum 	IV	<p>(kehadiran)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan makalah (paper) - Presentasi - Partisipasi kelas 		<ol style="list-style-type: none"> 2. M. Hamdan, <i>Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup</i>, (Bandung: Mandar Maju, 2000) 3. Muhammad Erwin, <i>Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup</i>, (Jakarta: Refika Aditama, 2008) 4. Siswanto Sumarso, <i>Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa</i>, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
18	Ujian Akhir Semester [UAS]			Tertulis	Murni hasil ujian UAS		